



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Indonesia praktek neo liberalisme telah berlansung sejak 20 tahun yang lalu, ketika neo liberalisme “dijahit” secara lebih sistematis oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan dalam bentuk butir-butir kebijakan. Praktek tersebut masih berjalan sampai saat ini, apalagi disaat krisis di paruh akhir 1997 kemarin, “memaksa” Indonesia menandatangani *LoI* sebagai prasyarat kerjasama dengan IMF untuk memulihkan krisis. Bersamaan dengan itu sederet kebijakan fiskal dan moneter seperti privatisasi, pengurangan subsidi, restrukturisasi perbankan dipraktekkan secara lebih ketat .

Terlebih lagi keadaan krisis saat ini semakin membuat posisi Indonesia terjepit, “tunduk” dalam neo liberalisme dengan serangkaian kebijakan yang kurang populis atau melawan, dengan catatan dan segar untuk *recovery* ekonomi akan dibekukan oleh lembaga-lembaga donor. Maka *recovery* ekonomi dan pembangunan dibawah arahan agen-agen neo liberalisme seperti IMF, WB sebagai pilihan utama.

Tetapi, kenyataan yang ada justru sebaliknya, praktek neo liberalisme lebih banyak memberikan pengaruh negatif terhadap keadaan ekonomi, politik di

1. Neo liberalisme saat ini telah menjadi rezim baru ekonomi politik internasional. Sebagai sebuah rezim tentu saja neo liberalisme di topang oleh beberapa instrumen pokok sebagai pembuat kebijakan. *Pertama* IMF dan WB, hadir menawarkan program bantuan ke sebuah negara dengan beberapa kesepakatan pokok yang disebut *Structural Adjustment Programm (SAP)* adapun derivasi dari SAP ini adalah *Letter of Intens (LoI)*. Kedua adalah WTO, sebagai organisasi dan polisi perdagangan dunia lewat aturan mainnya WTO akan meliberalkan, mengintegrasikan tatanan ekonomi nasional menjadi satu tatanan tunggal semisal lewat program liberalisasi pasar antara lain ; melarang proteksi ekonomi, pengurangan bea masuk perdagangan secara bertahap, penghapusan larangan ekspor import dan sebagainya. Adapun untuk di tingkat regional untuk mempercepat proses ini dibentuk lembaga-lembaga seperti AFTA, NAFTA Ketiga, MNCs/TNCs yang berfungsi sebagai pembuka pasar yang kini nyaris beroperasi di setiap negara. Terakhir adalah lembaga seperti S&P, Biro Investasi Moody sebagai penilai dan pengontrol keadaan ekonomi sebuah negara apakah layak menjadi tujuan investasi atau

Yogyakarta, 10 Desember 2014

2. Asumsi Neo liberalisme paralel dengan demokrasi tidak selamanya benar hal ini dibuktikan lewat pengalaman Indonesia dimasa Orde Baru, dimana yang muncul justru sebaliknya yaitu otoriterianisme.
3. Pengaruh neo liberalisme ternyata sejak 20 tahun yang lalu bahkan sampai hari ini . misalnya, kebijakan deregulasi, privatisasi, devaluasi, pengurangan subsidi. Oleh sebab itu sebuah negara akan melemah ketika berhadapan dengan neo liberalisme, dan justru menguat ketika berhadapan dengan rakyatnya. Sebagai contoh adalah beberapa kebijakan diatas.
4. Situasi krisis saat ini, pengaruh neo liberalisme kembali tercermin lewat serangkaian kebijakan, walaupun di lain pihak pemerintah memang tidak punya pilihan lain kecuali mengambil kebijakan tersebut, sebagai konsekwensi logis dari *SAP*, karena kebangkrutan dalam negeri akibat krisis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pencabutan subsidi BBM, TDL. Privatisasi, BUMN seperti Indosat, PT semen Gresik, Telkom dan lain-lain. Reformasi kebijakan moneter dengan kebijakan moneter ketat dan kurs mengambang terkendali.

B. Saran-saran

Mengingat autarki bukanlah pilihan yang tepat karena dalam keadaan dunia yang berbeda sekarang ini dimana satu negara saling terkait dengan negara lain, maka

Disinilah dituntut kejelian pemerintah untuk melihat hal tersebut, Hanya saja, agar pengaruh negatif dari neo liberalisme tidak sewenang-wenang, peran negara pun menjadi tidak kalah penting. Mekanisme pasar tetap berjalan, tetapi secara bersamaan negara dalam hal ini pemerintah, juga harus memeberikan perlindungan dengan serangkaian kebijakan untuk kebaikan ekonomi dalam negerinya, inilah yang disebut negara sebagai regulator. Tentunya ini akan terjadi dengan didukung oleh kemauan politik yang kuat dari pemerintah.

Kesimpulan dan saran yang diajukan ini tidak berarti tanpa bantahan atau sanggahan, karena penulis sadar sepenuhnya bahwa tulisan ini bukanlah sebuah ajaran yang harus di terima sebagai kebenaran mutlak. Adapun sanggahan dan kritikan justru akan semakin menambah khazanah perdebatan mengenai Neo-